

KATA PENGANTAR

Dengan maksud untuk mengembangkan system pertanian berbasis kelapa sawit, lebih meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendukung kebijakan swasembada daging , maka disamping berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit fungsional, di DIPA sub-sektor Perkebunan sejak tahun 2007 telah dialokasikan kegiatan pengembangan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi dan dilanjutkan pada tahun 2008 dan 2009. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka tahun 2010 dialokasikan kegiatan pengembangan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi di 9 Propinsi dan 15 Kabupaten.

Disadari bahwa maksud tersebut akan dapat tercapai apabila dapat berkembang gerakan pengembangan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi pada umumnya, dan pada perkebunan rakyat pada khususnya. Tumbuhnya gerakan dimaksud akan dapat berlangsung apabila secara teknis mudah dipahami dan terjangkau pelaksanaannya serta secara ekonomi cukup menguntungkan. Kondisi yang ada menggambarkan bahwa pilihan model yang paling menguntungkan belum sepenuhnya dapat diterapkan pelaksanaannya karena adanya berbagai keterbatasan, utamanya kecukupan ketersediaan bibit unggul yang dipandang paling menguntungkan pada wilayah pengembangan.

Berkenaan dengan berbagai keterbatasan yang dimaksud, maka dipandang perlu adanya Pedoman Umum bagi semua pihak terkait disemua tingkatan, agar penyelenggaraan kegiatan tetap dalam kerangka tertib administrasi yang ditentukan dan tertib teknis yang harus dipedomani.

Jakarta, Desember 2009
Direktur Jenderal Perkebunan



Achmad Mangga Barani
NIP. 19490612 197503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Konsepsi Pengembangan	5
B. Prinsip-prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	7
C. Kriteria Penerapan Pelaksanaan Kegiatan	8
D. Spesifikasi Teknis	9
E. Pemupukan Modal Kelompok	10
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Ruang Lingkup Kegiatan	11
B. Pelaksanaan	15
C. Lokasi dan Volume Kegiatan	17
D. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan	18
IV. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN	18
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	18
VI. PEMBIAYAAN KEGIATAN TAHUN 2010	19
VII. PENUTUP	19

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Ciri umum usaha pertanian/perkebunan rakyat adalah:
(i) Lahan usaha sempit; (ii) kurang memiliki akses keberbagai kemudahan yang diperlukan; (iii) tingkat produktivitas dibawah potensi normalnya; (iv) posisi tawar petani lemah, sehingga (v) kemampuannya sebagai sumber pendapatan keluarga cenderung terus menurun dalam menghadapi tuntutan kebutuhan yang terus meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun terakhir ini diperkenalkan model pengembangan sistem agribisnis berbasis komoditas melalui pemanfaatan aset secara optimal.

2. Perkebunan rakyat kelapa sawit yang telah cukup berkembang dan akan terus dipacu kelanjutan upaya pengembangannya, berpotensi untuk pengembangan sistem agribisnis berbasis komoditi kelapa sawit dengan pengembangan cabang usahatani ternak intensif, mengingat: (i) tersedia limbah, hasil samping, dan hijauan secara berkelanjutan, (ii) uji coba paket teknologi pemanfaatan limbah dan hasil samping telah tersedia dan akan terus berkembang; (iii) infrastruktur dan fasilitas penunjang relatif memadai, (iv) kelembagaan ekonomi petani telah cukup berkembang, (iv) bentuk pengusahaannya pada umumnya dalam bentuk hamparan dalam skala luas, karena harus terkait dengan unit pengolahan dengan kapasitas tertentu. Sedangkan faktor pembatas pengembangan ternak, khususnya sapi, adalah tersedianya pakan secara cukup terjangkau dan berkelanjutan.

3. Dewasa ini pemenuhan kebutuhan konsumsi daging nasional masih belum tercukupi, sehingga masih perlu diimpor dalam bentuk sapi potong dan daging, dan dilain pihak populasi ternak terus menurun, seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Impor Sapi dan Daging serta Populasi Sapi, Tahun 2001 - 2009

Tahun	Impor		Populasi Sapi (ekor)
	Sapi (ekor)	Daging (Kg)	
2001	251.390,0	16.516.6	
2002	379.338,0	11.473.8	11.298.000
2003	309.781,0	10.671.4	10.504.000
2004	339.181,0	11.772.0	10.533.000
2005	329.859,0	21.484.5	10.569.000
2006	369.443,0	25.949,2	10.875.000
2007	496.000,0	49.550,0	
2008	555.000,0	31.350,0	
2009			

Sumber: Ditjen Peternakan, Tahun 2009

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa keragaan impor 9 tahun terakhir fluktuatif dan cenderung terus meningkat, sedangkan populasi ternak sapi cenderung semakin menurun.

4. Usaha ternak sapi seperti keragaan tersebut di atas pada umumnya dilakukan oleh peternak skala kecil dan keberadaannya di sentra-sentra wilayah pertanian rakyat tradisional (sekitar 60% populasi ternak sapi potong berada di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara), sedangkan usaha perkebunan kelapa sawit umumnya di wilayah bukaan baru (Sumatera dan

Kalimantan), seperti pada lampiran 1. Oleh sebab itu percepatan penerapan pengembangan cabang usahatani ternak sapi pada wilayah perkebunan kelapa sawit perlu didorong dan dipacu bahkan dibantu melalui berbagai upaya terencana, baik oleh unit fungsional maupun berbagai pihak yang terkait. Keberhasilan berbagai upaya yang dimaksud pada waktunya akan memberikan berbagai manfaat, baik dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi, bahkan dalam jangka panjang berpotensi untuk ekspor, juga memperluas penyebaran pusat-pusat produksi ternak, serta mempertanggung usahatan perkebunan kelapa sawit.

5. Uji coba integrasi pengembangan usahatani ternak sapi potong pada perkebunan kelapa sawit sudah mulai banyak dilakukan, sehingga semakin tersedia pilihan model-model pengembangan. Sesuai peluang yang tersedia dan potensi manfaat dalam jangka panjang, maka pengembangan yang dipandang sesuai tidak sebatas penggabungan usaha ternak sapi dengan usaha perkebunan kelapa sawit, melainkan pengembangan sistem agribisnis berbasis perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu yang perlu dicari adalah model yang paling sesuai untuk diterapkan pada perkebunan rakyat kelapa sawit di setiap wilayah dari berbagai pendekatan pengembangan yang ada.



Gambar 1. Ternak Sapi hasil persilangan Sapi Bali dengan Impor asal Australia di perkebunan kelapa sawit PTPN IV Medan

6. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2010 dilakukan kegiatan pengembangan integrasi ternak sapi di wilayah perkebunan kelapa sawit pada umumnya, dan perkebunan rakyat pada khususnya. Kegiatan tahun ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan serupa pada tahun 2007, 2008 dan 2009. Agar pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka disusun PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN INTEGRASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN TERNAK SAPI.

B. Tujuan

Kegiatan pengembangan integrasi perkebunan rakyat kelapa sawit dengan ternak sapi dilatar belakangi oleh pertimbangan untuk mempertanggung usaha perkebunan rakyat kelapa sawit, sekaligus mendukung kebijakan

swasembada daging, melalui pemanfaatan potensi yang tersedia pada perkebunan kelapa sawit.

Oleh sebab itu, kegiatan pengembangan integrasi perkebunan rakyat kelapa sawit dengan ternak sapi ini dipandang masih perlu untuk memperkaya dan melengkapi berbagai kegiatan serupa yang telah dilakukan oleh unit fungsional, untuk mendukung tujuan jangka panjang, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem pertanian berbasis perkebunan kelapa sawit;
- b. Membudayanya gerakan pengembangan cabang usahatani ternak dengan sapi;
- c. Mendukung peningkatan populasi sapi untuk substitusi impor dan pada akhirnya untuk ekspor;
- d. Mendukung kebijakan ketahanan pangan;
- e. Mendukung pengembangan wilayah;

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Konsepsi pengembangan

Konsepsi pengembangan integrasi sawit – sapi idealnya terdiri dari : 1 paket utuh untuk 1 kelompok tani dan setiap lokasi minimal 3 paket utuh. Setiap 1 paket utuh terdiri dari : 50 ekor sapi/kelompok tani, 2 ekor sapi/petani, kandang (kelompok/individu), obat-obatan, bantuan pakan, chopper (perajang pelepah dan daun), mesin pembuat pakan, mesin biogas untuk seluruh petani (untuk energi memasak dan penerapan), mesin pembuat pupuk, gerobak, studi banding, pelatihan ketrampilan teknis, fasilitasi timbulnya gerakan serupa secara swadaya.

Sebagai kelanjutan kegiatan yang telah dirintis 3 (tiga) tahun yang lalu, maka dipandang perlu dilakukan pemantapan, dalam rangka kejelasan tujuan kegiatan, Dalam rangka pemantapan tersebut, terkait dengan tujuan introduksi integrasi sawit – sapi untuk secara bertahap mendorong tumbuhnya gerakan serupa secara swadaya, jangka waktu kegiatan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk setiap paket utuh, yaitu : pada 2 tahun pertama pelaksanaan introduksi integrasi sawit – sapi, bobot kegiatannya lebih bersifat teknis budidaya ternak sapi potong, sedangkan pada tahun 3, sifatnya evaluasi dan pengutuhan, dan tahun 4 sifatnya sosialisasi untuk menimbulkan gerakan pengembangan. Untuk itu secara garis besar tahapan secara utuh adalah sebagai berikut :

Tahun 1

Pengadaan sapi (minimal 50 ekor/kelompok, per petani 2 ekor), kandang, obat-obatan, bantuan pakan selama 6 bulan, pengadaan chooper (perajang pelepah/pembuatan pakan), studi banding, pelatihan ketrampilan teknis.

Tahun 2

Pengadaan alat biogas, pembuatan pupuk, gerobak, pelatihan ketrampilan teknis, konsolidasi dan pemantapan.

Tahun 3

Evaluasi dan pengutuhan kegiatan, dalam rangka persiapan pengembangan replikasinya

Tahun 4

Sosialisasi capaian keberhasilan ke okasi lain, untuk menjadi acuan tumbuhnya gerakan serupa secara swadaya



Gambar 2. Model Kandang Individu pada Integrasi Ternak Kelapa Sawit.

B. Prinsip-Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Agar hasil uji coba masing-masing model pengembangan dapat menjadi acuan dalam langkah implementasi dalam bentuk gerakan, maka prinsip-prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui pendekatan kelompok, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing petani anggota kelompok atau dilaksanakan bersama secara kelompok;

2. Petani atau kelembagaannya dalam melaksanakan kegiatan perlu menerapkan paket teknologi anjuran (intensif) yang disampaikan melalui pelatihan;
3. Paket kegiatan uji coba masing-masing model diusahakan penyediaan komponen-komponennya secara lengkap;
4. Paket bantuan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui dana Belanja Lembaga Sosial Lainnya yang dilakukan oleh petani atau kelembagaannya, mengacu kepada ketentuan Bantuan Sosial (BANSOS), yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian;
5. Kelompok penerima bantuan bukan kelompok baru, tetapi kelompok yang sudah ada. Untuk propinsi yang karena kekhususannya, dapat ditempuh upaya modifikasinya sesuai karakteristik wilayah setempat;
6. Paket pelaksanaan bantuan kegiatan bukan merupakan hibah, karenanya perlu ditetapkan pendekatan;
7. Seluruh tahapan kegiatan bukan merupakan hibah, karenanya perlu ditetapkan pendekatan pemupukan modal kelompoknya;
8. Pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing model perlu dilakukan pencatatan secara tertib untuk dapat menjadi laporan akhir.

C. Kriteria Penerapan Pelaksanaan Kegiatan

Dengan pertimbangan agar pelaksanaan kegiatan pengembangan masing-masing model keberhasilannya dapat menjadi acuan replikasi kelanjutan pengembangannya, penerapan pelaksanaan kegiatan ditempuh dengan kriteria:

1. Penentuan pilihan lokasi (mudah dijangkau, dukungan infrastruktur, kondisi kelembagaan petani dll);

2. Pilihan pendekatan kegiatan usaha (penggemukan atau usaha pembibitan);
3. Pilihan jenis sapi (pilihannya harus unggul, namun pada akhirnya tergantung ketersediaannya);
4. Pilihan pendekatan pemeliharaannya (kandang kelompok atau kandang individual);
5. Pilihan teknik pemeliharaan (pemanfaatan hasil samping dan limbah kelapa sawit, penyediaan mesin pencincang pelepah dan daun, pilihan makanan penguat, ditambah hijauan dari luar kebun);
6. Pilihan pendekatan pemanfaatan limbah sapinya (pupuk, biogas);
7. Pilihan pendekatan bantuan kepada petani (bagi hasil, perhitungan tingkat bunga, perguliran pada diri sendiri, perguliran berjenjang dll).

D. Spesifikasi Teknis

Setiap paket bantuan terdiri dari ternak sapi potong, bantuan obat-obatan, kandang dan pakan, alat pencacah pelepah dan daun, alat biogas serta kelengkapan lainnya. Dengan tetap berpegang pada pendekatan kelompok, sesuai dengan tujuan pokok kegiatan, idealnya setiap paket bantuan ternak sapi potong dapat mencapai 50 ekor/kelompok.

Namun mengingat harga setiap ekor sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan akan cukup beragam, maka pada akhirnya akan tergantung ketersediaan bibit, kesepakatan dengan petani dan ketersediaan anggaran. Demikian juga halnya untuk spesifikasi teknis kandang, alat pencacah pelepah dan daun, biogas serta perlengkapan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

E. Pemupukan Modal Kelompok

Dana yang disalurkan kepada kelompok merupakan bantuan sosial yang perlu dikembangkan untuk usaha produktif kelompok sehingga usaha kelompok yang bersangkutan mandiri. Dengan demikian anggota kelompok yang menerima dana bantuan social tidak memperolehnya secara cuma-cuma, namun mereka harus memupuk/mengembangkan usaha sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok.

Dari keragaan yang ada menunjukkan bahwa telah cukup beragam model pendekatan bantuan, baik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan, Pemerintah Daerah, Perbankan, ataupun penyandang dana/perusahaan ataupun kesepakatan masing-masing pelaku. Dengan pertimbangan dapat meningkatkan tumbuhnya keberlanjutan, disamping berbagai model pendekatan bantuan tersebut, pada usaha perkebunan kelapa sawit sesuai potensi yang tersedia dan budaya petani yang berorientasi keuntungan, dapat dipertimbangkan untuk menempuh pendekatan berjenjang untuk kegiatan usaha penggemukan.

Pendekatan berjenjang dimaksud dipandang lebih menarik dan menjamin keberlanjutannya dalam mengkondisikan kemandirian petani penerima bantuan untuk mampu memelihara ternak secara berkelanjutan serta tumbuhnya peran serta calon petani/kelompok penerima guliran dalam mengawasi kelancaran dan keberhasilan kegiatan, karena apabila gagal, calon petani/kelompok penerima tidak menerima.

Pendekatan berjenjang prinsipnya, adalah:

1. Sejak awal kegiatan dipilih dan ditetapkan petani/kelompok tani calon penerima bantuan awal dan petani/kelompok tani calon penerima;
2. Petani/kelompok tani penerima bantuan awal melaksanakan kegiatan sampai dengan keuntungan yang diperoleh cukup untuk membeli ternak sejumlah bantuan awal;
3. Ternak yang dibeli dari keuntungan menjadi paket bantuan untuk petani/kelompok tani penerima, sedangkan modal pokok juga dibelikan ternak untuk menjadi milik peternak penerima bantuan awal. Demikian seterusnya dengan pendekatan serupa.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Dengan pertimbangan keberhasilannya akan dapat mengkondisikan upaya pengembangan lebih lanjut, ruang lingkup kegiatan pengembangan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi, idealnya untuk PUSAT, PROPINSI dan KABUPATEN masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pusat

Kegiatan Pusat adalah:

- a. Menyusun Panduan Umum;
- b. Melakukan sosialisasi dalam rangka penyamaan persepsi tentang latar belakang dan konsep rencana kegiatan;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan workshop pengembangan cabang usahatani ternak sapi

- potong integratif pada wilayah perkebunan rakyat kelapa sawit untuk mencari pilihan model rencana kegiatan yang dipandang paling sesuai;
- d. Memfasilitasi studi banding dalam rangka pemantapan pilihan model rencana kegiatan;
 - e. Membahas penetapan kriteria calon lokasi dan calon petani sebagai bahan dalam identifikasi pilihan calon lokasi rencana kegiatan;
 - f. Memonitor proses pemilihan dan penetapan calon lokasi dan calon petani;
 - g. Melakukan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan pengawalan pengembangan cabang usahatani ternak sapi potong integratif pada wilayah perkebunan rakyat kelapa sawit;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi;
 - i. Menyusun laporan.

2. Kegiatan Propinsi

Kegiatan Propinsi adalah:

- a. Mengikuti workshop pengembangan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi;
- b. Mengikuti studi banding;
- c. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan;
- d. Melakukan sosialisasi dalam rangka penyamaan persepsi tentang latar belakang dan konsep rencana kegiatan;
- e. Membahas penetapan kriteria calon lokasi dan calon petani sebagai bahan dalam identifikasi pilihan calon lokasi rencana kegiatan;
- f. Memonitor dan mengawal proses pemilihan dan penetapan calon lokasi;

- g. Melakukan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan pengawalan pengembangan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- i. Menyusun laporan.

3. Kegiatan Kabupaten

Kegiatan di Kabupaten adalah:

- a. Mengikuti workshop pengembangan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi ;
- b. Mengikuti studi banding;
- c. Menyusun Petunjuk Teknis;
- d. Membahas penetapan kriteria calon lokasi dan calon petani sebagai bahan dalam identifikasi pilihan calon lokasi rencana kegiatan;
- e. Melakukan review, seleksi dan menetapkan calon lokasi dan calon petani;
- f. Melakukan sosialisasi kepada petani tentang rencana pelaksanaan kegiatan;
- g. Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan teknis;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan oleh petani;
- i. Melakukan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan pengawalan pengembangan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun laporan.



Gambar 3. Sosialisasi Integrasi Ternak pada Perkebunan Kelapa Sawit.



Gambar 4. Demonstrasi Penggunaan Alat Pengolah Pakan oleh Teknisi yang disaksikan Petani Binaan Integrasi.

Untuk tahun 2010, paket BANSOS pengadaan ternak disediakan dana melalui APBN DIPA Sub Sektor Peternakan dan tidak dialokasikan pengadaan ternak pada

DIPA Sub Sektor Perkebunan. Sedangkan paket untuk pengadaan alat pencacah pelepah, alat biogas, peningkatan ketrampilan petani serta kelengkapan lainnya, disediakan dana melalui APBN sub-sektor Perkebunan. Biaya sosialisasi, pengawalan dan operasional lainnya ditingkat propinsi disediakan dana melalui APBN sub-sektor Perkebunan, sedangkan ditingkat Kabupaten diharapkan dapat bersumber dari dana APBN tingkat propinsi, APBD dan atau swadaya petani dan sumberdana lain yang memungkinkan.

B. Pelaksanaan

Pelaksana langsung kegiatan pengembangan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi adalah petani/kelompok tani terpilih yang telah ditetapkan melalui proses seleksi, dengan mengacu pedoman teknis yang telah ditetapkan.

Dengan maksud agar penyelenggaraannya dapat berlangsung sesuai tertib teknis dan administrasi sesuai ketentuan, maka pelaksanaan kegiatan oleh petani/kelompok tani dibawah bimbingan, pendampingan dan koordinasi:

- a. Dinas Kabupaten/Propinsi setempat yang mebidangi perkebunan sebagai penanggung jawab kegiatan;
- b. Petugas Dinas Kabupaten/Propinsi yang membidangi perkebunan yang ditunjuk untuk menangani administrasi kegiatan;
- c. Petugas unit fungsional terkait untuk konsultasi kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- d. Petugas teknis yang ditunjuk untuk memberikan pembekalan ketrampilan, bimbingan dan pendampingan teknis pelaksanaan.

Dengan pertimbangan dana paket bantuan berasal dari berbagai sumber, kerjasama dan peran aktif dari masing-masing pelaksana kegiatan sangat mendukung keberhasilan.



Gambar 5. Pembagian Ternak Sapi oleh Disbun Kabupaten kepada Petani Binaan Tahun 2007.

C. Lokasi dan Volume Kegiatan

Lokasi dan volume kegiatan pengembangan cabang usahatani ternak sapi potong integratif pada perkebunan rakyat kelapa sawit tahun 2010 di 9 Provinsi 15 Kabupaten adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi	Volume
1	Provinsi Riau	
	a. Kabupaten Kampar	1 Paket
	b. Kabupaten Rokan Hulu	1 Paket
2	Provinsi Jambi	
	a. Kabupaten Muaro Jambi	1 Paket
	b. Kabupaten Tanjabar	1 Paket
	a. Kabupaten Muaro Jambi	1 Paket
3	Provinsi Sumsel	
	a. Kabupaten OKI	1 Paket
	b. Kabupaten OKU Timur	1 Paket
4	Provinsi Bengkulu	
	Kabupaten Bengkulu Utara	1 Paket
5	Propinsi Kalbar	
	a. Kabupaten Sekadau	1 Paket
	b. Kabupaten Sintang	1 Paket
6	Propinsi Kalteng	
	Kabupaten Kotawaringin Barat	1 Paket
7	Provinsi Kalsel	
	Kabupaten Tanah Laut	1 Paket
9	Propinsi Sulbar	
	Kabupaten Mamuju	1 Paket
8	Propinsi Banten	
	a. Kabupaten Pandeglang	1 Paket
	b. Kabupaten Lebak	1 Paket

Setiap paket bantuan terdiri dari bantuan alat biogas serta kelengkapan lainnya, pelatihan ketrampilan teknis dan studi banding. Dengan tetap berpegang pada pendekatan kelompok, sesuai dengan tujuan pokok kegiatan, idealnya setiap paket bantuan ternak sapi potong dapat mencapai 50 ekor/ kelompok.

D. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

Organisasi pelaksanaan kegiatan lingkup unit fungsional pada semua tingkatan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sedangkan organisasi pelaksanaan tingkat kelompok tani diatur sesuai musyawarah kelompok.

IV. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pengendalian, pengawasan dan pelaporan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 431/Kpts/RC.210/7/2004 tentang Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program/Proyek di Lingkungan Departemen Pertanian tanggal 13 Juli 2004.

VI. PEMBIAYAAN KEGIATAN TAHUN 2010

Kegiatan pengembangan cabang usahatani ternak sapi potong integratif pada wilayah perkebunan rakyat kelapa sawit tahun 2010 di Pusat dibiayai melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan. Sedangkan kegiatan di Propinsi dibiayai melalui APBN Dekonsentrasi dan di Kabupaten dibiayai melalui Tugas Perbantuan (TP).

Secara garis besar alokasi anggaran tingkat Pusat dan Propinsi untuk kegiatan workshop, sosialisasi, bimbingan, pengawalan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan alokasi anggaran tingkat Kabupaten berupa belanja lembaga sosial lainnya, yang secara garis besar untuk pengadaan peralatan pencacah pelepah kelapa sawit, pengadaan alat biogas, peningkatan ketrampilan dan pendampingan kegiatan lapangan serta kelengkapan lainnya.

Tata cara pengelolaan anggaran kegiatan di masing-masing tingkatan unit fungsional dan biaya kegiatan lapangan, tertib administrasi dan tertib pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Khusus untuk pemanfaatan belanja lembaga sosial lainnya, penerapannya atas kesepakatan kelompok atas dasar potensi dan kondisi yang tersedia setempat, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman umum ini disusun sebagai salah satu acuan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengembangan cabang usahatani ternak sapi potong pada wilayah perkebunan rakyat kelapa sawit, baik Tingkat Pusat, Propinsi

dan Kabupaten serta pihak-pihak terkait lainnya dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan.

Dalam rangka lebih memberikan kejelasan penyelenggaraan pelaksanaannya agar tertib teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan mampu mencapai hasil sesuai yang diharapkan, maka Propinsi menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Kabupaten menerbitkan Petunjuk Teknis.

Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat berperan dalam membudayakan pengembangan cabang usahatani ternak sapi potong pada wilayah perkebunan rakyat kelapa sawit, yang pada tingkat usahatani akan merupakan implementasi dari kebijakan pengembangan sistem pertanian berbasis komoditas kelapa sawit, yang akan meningkatkan produktivitas usahatani dan secara nasional akan mendukung kebijakan peningkatan populasi sapi untuk substitusi impor dan ekspor, dan ketahanan pangan. Capaian keberhasilan yang dimaksud akan dapat terwujud melalui integrasi perencanaan, kesamaan tekad dan kerjasama semua pihak terkait.

Jakarta, Desember 2009
Direktur Jenderal Perkebunan

Achmad Mangga Barani
NIP. 19490612 197503 1 001

Lampiran 1. Keragaan Penyebaran Perkebunan Kelapa Sawit dan Usaha Ternak Sapi Potong Tahun 2008.

No	Propinsi	Luas Perkebunan Kelapa Sawit	Populasi Sapi Potong
		Ha	Ekor
1	NAD	276.011	763.895
2	Sumatera Utara	842.883	267.333
3	Sumatera Barat	289.798	463.027
4	Riau	1.354.036	120.352
5	Kepulauan Riau	6.087	7.348
6	Jambi	408.304	126.500
7	Sumatera Selatan	621.657	583.986
8	Bangka Belitung	130.635	5.588
9	Bengkulu	123.243	87.223
10	Lampung	150.542	412.228
11	Banten	12.614	21.567
12	Jawa Barat	8.570	277.894
13	Jawa Tengah	0	1.401.781
14	DI Yogyakarta	0	253.848
15	Jawa Timur	0	2.646.071
16	Bali	0	618.576
17	Nusa Tenggara Barat	0	491.004
18	Nusa Tenggara Timur	0	555.293
19	Kalimantan Barat	530.999	176.574
20	Kalimantan Tengah	485.662	66.465
21	Kalimantan Selatan	192.650	202.452
22	Kalimantan Timur	275.830	75.356
23	Sulawesi Utara	0	116.536
24	Sulawesi Tengah	117.492	197.794
25	Sulawesi Selatan	19.925	646.796
26	Sulawesi Tenggara	12.149	247.120
27	Sulawesi Barat	90.248	95.053
28	Gorontalo	0	235.798
29	Maluku	0	70.014
30	Maluku Utara	0	42.481
31	Iriabur/Papua Barat	40.540	33.586
32	Papua	85.051	56.016

**PEDOMAN UMUM
PENGEMBANGAN CABANG USAHATANI
TERNAK SAPI POTONG INTEGRATIF
PADA PERKEBUNAN RAKYAT KELAPA
SAWIT**

**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
JAKARTA, DESEMBER 2008**